

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital dimana bisnis semakin kompleks dan sangat kompetitif, menuntut perusahaan adanya informasi yang inovatif dan akurat dalam setiap pengambilan keputusan, maka semua perusahaan di setiap industri harus terus meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa untuk mencapai hasil yang kompetitif. Maka dari itu perlunya sistem informasi untuk perusahaan, karena sistem informasi merupakan dasar dari semua operasi bisnis, itu sangat penting untuk manajemen dan operasi bisnis. Bisnis modern juga bergantung pada sistem informasi. Sistem informasi menjadi sangat penting untuk membantu jalannya bisnis di ekonomi global, dan tanpanya, banyak industri akan sulit bertahan. Mengubah dirinya menjadi perusahaan digital untuk menjadi lebih kompetitif dan efisien, perusahaan saat ini menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan utama organisasi, seperti keunggulan operasional, produk baru, pelayanan, dan model bisnis, hubungan pelanggan-pemasok, peningkatan proses pengambilan keputusan, keunggulan kompetitif, dan lebih banyak lagi.

Konsep Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangat penting bagi perusahaan karena membantu mereka membuat keputusan keuangan. SIA umumnya adalah kumpulan formulir, catatan, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah data bisnis untuk membuat laporan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengawasi bisnis. Menurut Bodnar dan Hopwood (1998), sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dimaksudkan untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Untuk kepentingan pengambilan keputusan, data yang dihasilkan akan digunakan dalam berbagai bentuk. Para pengambil keputusan akan membuat keputusan teknis dan nonteknis

dengan menggunakan data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi. Perubahan ini dicapai oleh sistem informasi akuntansi melalui operasi manual dan komputerisasi. Pada dasarnya, Sistem Informasi Akuntansi merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen, yang bertanggung jawab atas pengelolaan data transaksi dari semua aktivitas yang dilakukan. Dalam Sistem Informasi Manajemen, semua data organisasi, baik keuangan maupun nonkeuangan, dikelola untuk menjadi informasi bagi seluruh tingkatan manajemen, termasuk manajemen puncak, menengah, dan bawah, untuk membantu mereka membuat keputusan. Selain itu, informasi yang diberikan oleh Sistem Informasi Akuntansi digunakan untuk membantu pengambilan keputusan.

Didalam perusahaan setiap transaksi pembelian yang terjadi harus melalui proses akuntansi yang baik dengan mengandalkan sistem informasi akuntansi yang baik pula. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang akurat untuk pembelian perusahaan yang umumnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa akan sangat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Namun, pengendalian sistem pembayaran atas proses pengadaan barang dan jasa membutuhkan akuntabilitas perusahaan dalam menyediakan informasi yang memadai untuk menyelesaikan dan mengevaluasi keluhan.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah proses pembelian barang dan jasa untuk lembaga pemerintah, seperti kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan lembaga lainnya. Proses ini dimulai dengan perencanaan kebutuhan dan berakhir dengan penyelesaian keseluruhan pengadaan barang dan jasa (Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). Dalam suatu perusahaan, pengadaan barang dan jasa memiliki banyak fungsi penting. Pertama, pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi pengadaan barang/jasa memungkinkan pengembangan strategi yang efektif untuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Kedua, pelaksanaan pembinaan teknis administrasi pengadaan barang/jasa memastikan bahwa prosedur pengadaan yang

diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Ketiga, koordinasi perumusan dan pembinaan kebijakan di bidang administrasi pengadaan barang/jasa. Keempat, dengan mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengadaan barang dan jasa sangat memengaruhi operasi pemerintahan dan bisnis. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam berbisnis, baik di perusahaan maupun institusi. Proses pengadaan harus memberikan hasil yang dapat mencapai yang terbaik dan memaksimalkan kepentingan perusahaan atau pemerintahan yang ada. Mekanisme pengadaan barang diperlukan untuk secara efektif dan efisien mendapatkan barang atau jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan barang dan jasa sama dengan menambah dan memperbaiki fasilitas bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, dan mengadakan kursus bahasa Inggris di lembaga pemerintah.

Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah merupakan bagian penting dari proses pembangunan suatu wilayah (Putra & Adnanto, 2019). Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) bertanggung jawab untuk pengeluaran barang dan jasa ini. Tentu saja, peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangatlah penting untuk mencapai hasil yang optimal. Kerjasama antara pemerintah kota dan SKPD membantu membangun daerah. Dalam pengadaan barang dan jasa, SKPD memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien. SKPD bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan barang dan jasa yang akan dibeli, dengan memastikan pengadaan dilakukan secara efisien, terbuka, dan kompetitif, serta mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 29 Tahun 2020 tentang "Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa" membawa

perubahan signifikan dalam penilaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa, sehingga SKPD harus memastikan pengelola pengadaan memahami dan mematuhi peraturan ini. Dengan demikian, SKPD memainkan peran penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efisien, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Masyarakat membutuhkan transparansi pelayanan pemerintah. Selama ini, masih sering ditemukan aparat pemerintah yang tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya dalam melayani masyarakat, sehingga masyarakat belum memiliki kesempatan yang cukup untuk ikut serta mengontrol kinerja pemerintahan. Selain itu, kurangnya akses informasi bagi masyarakat juga menjadi hambatan. Pada dasarnya, peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan birokrasi daerah masih belum diperhatikan. Masyarakat juga melihat kemajuan dalam mendapatkan informasi. Salah satu implementasinya adalah dengan menerapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik; ini berarti pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah secara elektronik dikenal sebagai *e-Procurement*. Istilah ini mengacu pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Metode pengadaan elektronik ini dikenal sebagai *e-Tendering* atau *e-Purchasing*, sebagai salah satu pendekatan untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik, *e-Purchasing* merupakan salah satu teknologi informasi yang sangat populer dan efektif dalam pengadaan barang dan jasa.

Aplikasi yang disebut *e-procurement* memungkinkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet. *E-tendering* atau *e-purchasing* adalah metode pengadaan elektronik barang dan jasa. Menurut beberapa sumber,

pengadaan elektronik berarti pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. *E-procurement* adalah sistem lelang untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet agar efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel, menurut Sutedi (2012:254).

E-procurement mengurangi kemungkinan kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan. Sehingga, proses pengadaan menjadi lebih transparan, hemat waktu dan biaya, dan mudah dalam pertanggung jawaban keuangannya. Untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran negara yang dibelanjakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, diperlukan upaya untuk menciptakan proses pengadaan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip persaingan dan kompetisi yang sehat. Upaya ini diperlukan untuk mendapatkan barang dan jasa berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan finansial. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, terbuka, kompetitif, dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dari segi administrasi, teknis, dan keuangan. Menurut Suprianto et al. (2019), tujuan umum penggunaan *e-procurement* adalah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik.

Proses pengadaan barang dan jasa sekarang tergantung pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. *e-Purchasing* adalah proses pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang mencakup daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu yang ditawarkan oleh berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah (LKPP 14,2015).

Badan Pusat Statistik merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan *e-Purchasing*, maka dari itu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat diperlukannya administrasi yang terdiri dari beberapa fungsi dan harus dilakukan secara bersamaan dan efektif. Salah satu fungsi perbekalan adalah pengadaan, yang mencakup pembelian barang bekal dalam jumlah yang dibutuhkan dan penyerahan barang tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Maka Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul **“Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Barang dan Jasa E-purchasing Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan e-purchasing di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana perbandingan proses pengadaan barang secara langsung dan secara e-purchasing di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan e-purchasing di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui perbandingan proses pengadaan barang secara langsung dan secara e-purchasing di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Penulis

- a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama magang ke dalam pekerjaan secara nyata setelah lulus dari Universitas Andalas.
- b. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam berorganisir dan bersosialisasi di lingkungan kerja.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi jenjang Diploma III Universitas Andalas.

Bagi Instansi

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerja sama.
2. Sebagai bahan evaluasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat atas keputusan yang telah dibuat pada masa lalu dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Magang

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi (pengamatan) atau Pengambilan data pada kantor BPS Sumbar yaitu dengan pengambilan informasi melalui kegiatan spontan pada saat magang berlangsung.

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah hanya fokus pada Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Barang dan Jasa E-purchasing pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode magang, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

BAB II Membahas tentang Landasan teori berisi mengenai Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Barang dan Jasa E-purchasing pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat.

BAB III Gambaran Umum Kantor

BAB III menjelaskan tentang tempat magang pada bab ini menjelaskan profil kantor kemudian sejarah kantor, lokasi, tujuan, logo dan struktur organisasi.

BAB IV Pembahasan

BAB IV Pembahasan menjelaskan tentang hasil dari metode yang digunakan, yang mana harus menyajikan fakta yang terjadi ketika di lapangan pada saat magang. Pada bagian ini harus dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V Penutup

BAB V Penutup Berisi tentang kesimpulan yang diambil dari analisis dari pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan perubahan masa yang akan datang.